

Peningkatan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Jaringan Organisasi Administratif di Kabupaten Kolaka

Sartono¹, Muhammad Amir², Syamsul Alam³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo

email : sartonos1969@gmail.com

Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan upaya pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan menggunakan pendekatan Network Administrative Organization. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus studi kasus di desa wisata Kabupaten Kolaka. Analisis silang data akan menggabungkan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi hubungan antara peran Organisasi Administrasi Jaringan, partisipasi masyarakat, dan hasil pembangunan desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Administrasi Jaringan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam mengembangkan desa wisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif dan berkelanjutan di Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kepercayaan, tujuan jaringan consensus dan jumlah peserta yang mendukung desa wisata. Kepercayaan yang tinggi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil mendukung keterlibatan aktif dan komunikasi terbuka. Keragaman peserta dari berbagai sektor, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, membawa beragam perspektif dan sumber daya yang kaya. Konsensus tujuan yang kuat memandu upaya kolaboratif dan memotivasi inovasi.

Kata kunci : Desa Wisata; Ekonomi Kreatif; Kolaborasi; Organisasi Administratif Jaringan

ABSTRACT

This research outlines efforts in developing the Tourism Village and Creative Economy in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia, utilizing the Network Administrative Organization approach. Employing a qualitative method, the study primarily focuses on a case study in the tourism village of Kolaka Regency. Cross-data analysis will combine interviews and observations to identify the relationship between the role of the Network Administrative Organization, community participation, and the outcomes of tourism village development. The findings indicate that the Network Administrative Organization holds significant potential as a primary driver in developing a competitive and sustainable tourism village and creative economy in Kolaka Regency. This is achieved by considering factors such as trust, consensus network goals, and the number of participants supporting the tourism village. High levels of trust among the government, private sector, and civil society support active involvement and open communication. The diversity of participants from various sectors, including government, private, and civil society, brings diverse perspectives and rich resources. A strong consensus on goals guides collaborative efforts and motivates innovation.

Keywords : *Tourism Village; Creative Economy; Collaboration; Network Administrative Organization.*

PENDAHULUAN

Peningkatan desa wisata dan ekonomi kreatif menjadi fokus penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Potensi ekonomi dan pembangunan lokal telah menjadi salah satu sektor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Program desa wisata merupakan salah satu program utama dalam upaya pembangunan desa (Ariyani et al., 2023; Wibowo et al., 2021). Oleh karena itu, pengembangan desa wisata tradisional telah mengubah rekayasa ekologi dan pembangunan berkelanjutan (Wang & Li, 2021). Dengan pesona alam dan warisan budaya yang luar biasa, Kabupaten Kolaka telah menemukan potensi besar dalam pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tetap mempertahankan dan menghargai warisan lokal. Pengembangan tempat wisata dilakukan dengan mengacu pada data yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Padhil & Purnomo, 2018). Namun, dalam merintis pertumbuhan desa wisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, merupakan suatu keharusan untuk menggabungkan teknologi dan infrastruktur yang relevan sehingga potensi pengembangan dapat diaktualisasikan secara maksimal.

Pengembangan sumber daya pariwisata dalam lingkup dinas pariwisata mengacu pada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pariwisata. Desa ini berpotensi menjadi tujuan wisata karena memiliki beberapa keunggulan yang dapat dijelaskan sebagai objek wisata, antara lain warisan budaya, keindahan alam, seni, dan kerajinan (Handayani et al., 2019). Tujuan pengembangan sektor pariwisata adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan (Rosari et al., 2023). Di dalamnya mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pekerja di dinas pariwisata sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dalam memajukan sektor pariwisata di suatu daerah atau destinasi wisata. Hasil penelitian (Fafurida et al., 2023) menunjukkan bahwa desa wisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa.

Pelaksanaan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Kolaka adalah dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kolaka. Dalam menjalankan program ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab, dengan

dukungan dari berbagai instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Kolaka. Selain itu, program ini juga mendapat dukungan dari sektor swasta dan partisipasi masyarakat.

Implementasi kebijakan tata kelola jaringan pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, PLN, Badan Usaha Milik Desa, Pokdarwis, dan Bank Indonesia. Sektor swasta terdiri dari PT Antam Tbk, Perusda, dan PT Vale Indonesia Tbk serta awak media, yang membantu dalam promosi dan pengenalan berbagai tujuan wisata di Kabupaten Kolaka. Dan elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka. Setiap aktor yang terlibat dalam jaringan memiliki karakteristik unik sebagai entitasnya, sehingga penting untuk mengarahkan jaringan agar berfungsi secara efektif (Nahrawi et al., 2021).

Desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka telah terlihat dengan kemenangan Desa Sani-Sani sebagai juara harapan dalam kategori pengembangan desa wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa ini adalah salah satu dari delapan desa dalam kategori pembangunan di seluruh nusantara. Penghargaan ini diberikan pada acara Penghargaan Desa Wisata Indonesia 2023 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Minggu, 27 Agustus 2023. Bersama penerima penghargaan lainnya, Kepala Desa Sani-sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, A. Mujur, S.H, langsung menerima piala penghargaan dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo.

Kompetisi Anugerah Desa Wisata Indonesia merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021. Program ini merupakan salah satu penghargaan bagi desa wisata yang memenuhi kriteria kompetisi yang ditetapkan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Melalui penganugerahan Indonesian Tourism Village Award, desa-desa di Indonesia yang kaya akan destinasi pariwisata dapat mempromosikan destinasinya sebagai kelas dunia dengan daya saing dan keberlanjutan global. Setiap desa menampilkan keunikan dan keunggulannya, lengkap dengan fasilitas seperti homestay, toilet umum, dan lain-lain.

Wisata Tanjung Malaha juga merupakan destinasi yang memiliki potensi besar dengan keindahan alamnya. Sebagai langkah mempromosikan Pariwisata Tanjung Malha, Pemerintah

Daerah Kabupaten Kolaka bersama Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dipadukan dengan hiburan dan permainan menarik sekaligus memperkuat Gerakan Bangsa Nasional Buatan Indonesia, Gerakan Kebanggaan Pariwisata Indonesia, dan Festival Ekonomi pada Minggu, 31 Oktober 2021. Selain Desa Sani-sani dan Wisata Tanjung Malha, Sungai Tamborasi yang juga dikenal sebagai sungai terpendek di dunia dan terletak di Kabupaten Kolaka berhasil meraih juara ketiga sebagai destinasi wisata unik terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2020 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Namun, meski begitu, daya tarik dan pesona destinasi wisata Sungai Tamborasi ini belum cukup untuk membuatnya terkenal di kalangan masyarakat internasional (Afifa Yuniarti et al., 2022).

Di era digital saat ini, peran teknologi informasi dan komunikasi semakin penting dalam menghubungkan desa wisata dan ekonomi kreatif dengan pasar global, mengelola operasional, dan meningkatkan pengalaman yang diberikan kepada wisatawan. Adopsi organisasi administratif jaringan muncul sebagai pendekatan yang sangat berharga untuk mengelola infrastruktur teknologi yang mendukung pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif. Tahun 2013 adalah awal dari proses peralihan jaringan ke pola tata kelola baru, dengan pembentukan organisasi administrasi jaringan (Lacatus, 2022). Organisasi Administrasi Jaringan berfungsi sebagai pengelola infrastruktur organisasi dan bertindak sebagai perantara dalam menjalin hubungan antar aktor dalam jaringan maupun antara jaringan dengan mitra eksternal (Nguyen Long & Krause, 2021). Organisasi Administratif Jaringan juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber, memproses informasi itu, dan memperjuangkan preferensi dan kebutuhan pemangku kepentingan (Adriaenssens et al., 2019). Riset (Whetsell et al., 2020) menemukan bahwa pemerintah dapat mencapai kebijakan menggunakan inovasi melalui kerja sama antara berbagai organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Ini melibatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan pemerintah yang efisien.

Keterlibatan pelaku dari organisasi lintas sektoral memerlukan mekanisme koordinasi yang dapat menjawab kebutuhan masing-masing pelaku wisata dalam meningkatkan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka, pada kenyataannya menghadapi hambatan dalam upaya mewujudkan implementasi kebijakan yang terintegrasi antar aktor yang terlibat dalam perbaikan desa wisata. Sebagai program kebijakan yang melibatkan banyak aktor, tentunya tingkat kompleksitas dalam mengelola jaringan meningkat seiring dengan semakin banyaknya aktor yang terlibat. Implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan kerjasama berbasis jaringan antar organisasi merupakan salah satu opsi yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pendekatan jaringan telah dianggap sebagai mekanisme yang

layak untuk menyediakan layanan dan menerapkan kebijakan sebagai alternatif untuk tata kelola hierarkis (Provan & Kenis, 2008).

Dalam konteks identifikasi tiga bentuk tata kelola jaringan yang dapat disesuaikan, ada tiga model yang dipaparkan, yaitu: 1) Participant/Shared Governed Network adalah bentuk tata kelola jaringan di mana jaringan terbentuk dari inisiatif anggota jaringan, baik secara formal maupun informal. Koordinasi antara anggota jaringan dilakukan tanpa entitas organisasi yang mengatur atau satu anggota memiliki kontrol penuh. Sebaliknya, pengaturan ini didasarkan pada kesetaraan keterlibatan di antara semua anggota dalam proses pemerintahan; 2) Lead organization Regulated Network adalah bentuk tata kelola jaringan di mana salah satu anggota jaringan diberi peran sebagai pemimpin atau kepemimpinan organisasi yang mengawasi jaringan. Keputusan diambil dan dikoordinasikan oleh anggota yang memiliki peran kepemimpinan ini. Pemilihan pemimpin dapat didasarkan pada keputusan anggota jaringan atau dapat diamanatkan oleh peraturan yang mengikat, dan 3) Organisasi Administratif Jaringan adalah entitas organisasi yang dibentuk secara terpisah dan bertanggung jawab sebagai perantara dan pengatur kegiatan di antara anggota jaringan. Organisasi Administrasi Jaringan dapat berupa individu atau organisasi yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi administrasi dan koordinasi dalam jaringan. Ketiga bentuk ini mencerminkan cara yang berbeda dalam mengatur dan mengelola tata kelola jaringan tergantung pada tujuan, sifat, dan kebutuhan jaringan (Boeke, 2017; Braun, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan tata kelola jaringan merupakan elemen penting dalam menyukseskan suatu kebijakan yang melibatkan berbagai pelaku dari berbagai lintas sektor. Pengelolaan seluruh jaringan merupakan salah satu aspek utama yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, karena dapat mempengaruhi hasil kerjasama yang berhasil atau gagal (Iborra et al., 2018). Dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah lebih jauh dari penelitian sebelumnya. Salah satu hal baru utama dalam penelitian ini adalah penegasan peran yang lebih kuat untuk Organisasi Administrasi Jaringan yang disajikan oleh (Provan & Kenis, 2008) Dalam pola hubungan jejaring kerja sama: kepercayaan, konsensus tujuan jaringan, kebutuhan kompetensi tingkat jejaring, dan jumlah peserta pendukung desa wisata. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran teknologi dalam sektor pariwisata, studi ini akan merinci secara mendalam bagaimana implementasi organisasi administrasi jaringan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kabupaten Kolaka. Selanjutnya, penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam tentang peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Penulis

berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi antara masyarakat lokal, organisasi administratif jaringan, dan pemerintah daerah dapat membentuk sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemahaman ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial dan dampak yang diciptakan dalam konteks desa wisata dan ekonomi kreatif. Penelitian ini memberikan wawasan bagaimana mengintegrasikan berbagai faktor yang dapat menjadi pendorong utama dalam mengembangkan desa wisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kabupaten Kolaka.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus studi kasus di desa wisata Kabupaten Kolaka. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, organisasi administrasi jaringan, dan pemerintah daerah terkait pariwisata. Penggunaan teknologi dan peran Network Administrative Organization dalam pengembangan desa wisata akan dianalisis melalui analisis isi dari data wawancara. Pengamatan partisipatif juga akan dilakukan untuk memahami interaksi sehari-hari dan implementasi teknologi. Analisis silang data akan menggabungkan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi hubungan antara peran Organisasi Administrasi Jaringan, partisipasi masyarakat, dan hasil pembangunan desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Organisasi Administratif Jaringan

1. Kepercayaan

Pakar tata kelola jaringan berpendapat bahwa intervensi dalam struktur tata kelola, seperti pembentukan organisasi administrasi jaringan baru, dapat memfasilitasi kolaborasi dalam jaringan yang memiliki tingkat kepercayaan dalam memberikan layanan publik yang efektif (Manandhar et al., 2022). Kepercayaan dalam konteks kolaborasi seperti Peningkatan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif melalui Jaringan Organisasi Administrasi di Kabupaten Kolaka, merupakan faktor kunci yang mendukung keberhasilan kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat. Kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam teori kolaborasi (Kozuch & Sienkiewicz-Małyjurek, 2022). Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepercayaan kolaboratif yang signifikan antara elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam organisasi administrasi jaringan Kabupaten Kolaka. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif, komunikasi terbuka, dan kerja sama yang kuat antara ketiga sektor ini dalam mendukung pengembangan

Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana kepercayaan ini beroperasi.

Pertama, kepercayaan antara Pemerintah dan Dunia Usaha. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa pemerintah (termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka) menjalankan perannya dengan transparansi dan komitmen dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Dunia bisnis, yang meliputi PT Antam Tbk, Perusda, dan PT Vale Indonesia Tbk, terlibat aktif dalam investasi dan promosi destinasi pariwisata. Mereka membantu meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Kolaka melalui inisiatif pribadi mereka.

Kepercayaan antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil/Pemuda Setempat. Kepercayaan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat sipil, termasuk Badan Usaha Milik Desa dan Pokdarwis, merasa didengar oleh pemerintah dan aspirasi mereka akan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Pemerintah percaya bahwa masyarakat sipil akan bekerja sama dengan baik dalam menjalankan inisiatif dan akan mengelola sumber daya dengan baik.

Kedua, kepercayaan antara Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil/Pemuda Lokal. Hal ini mengacu pada kepercayaan PT Antam Tbk, Perusda, dan PT Vale Indonesia Tbk dalam mendukung dan berkontribusi positif terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka. Masyarakat sipil, termasuk pemuda setempat, percaya bahwa PT Antam Tbk, Perusda, dan PT Vale Indonesia Tbk akan beroperasi dengan integritas dan menghormati nilai-nilai lokal dan keberlanjutan.

Ketiga, kepercayaan bersama dalam tujuan bersama. Semua pelaku tata kelola ini berbagi kepercayaan pada tujuan bersama mereka, yaitu untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Kolaka. Kepercayaan ini memotivasi mereka untuk bekerja sama dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan keterbukaan dan transparansi dalam pertukaran informasi dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan. Semua pihak merasa bahwa mereka memiliki akses ke informasi yang diperlukan dan bahwa prosesnya adil dan jujur. Setiap pelaku pemerintahan percaya bahwa pihak lain memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi positif terhadap pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif. Perubahan perbedaan pendapat mengakibatkan perubahan tingkat kepercayaan (Zha et al., 2023), Jadi kepercayaan yang kuat akan membantu dalam menangani konflik (Khayat-zadeh-Mahani et al., 2017).

Pentingnya kepercayaan dalam kolaborasi ini adalah bahwa tanpa kepercayaan yang memadai antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, upaya untuk meningkatkan desa wisata dan ekonomi kreatif dapat terhambat. Temuan (Al-Omouh et al., 2023; Khan et al., 2021; Piatak et al., 2018) Kolaboratif meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempromosikan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Membangun dan menjaga kepercayaan ini adalah salah satu langkah kunci untuk mencapai keberhasilan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka. Namun, dalam meningkatkan desa wisata dan ekonomi kreatif, pemerintah Kabupaten Kolaka masih kurang memiliki kepercayaan terhadap badan usaha untuk berkontribusi aktif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan pribadi dalam pengambilan keputusan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepercayaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil telah mendukung peningkatan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kolaka. Upaya untuk memahami dan mengatasi kekurangan dalam indikator kepercayaan dapat membantu dalam pengembangan program berkelanjutan yang lebih efektif.

2. Jumlah peserta

Tata kelola mengacu pada cara aktor berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam struktur atau jaringan politik (Geron et al., 2023). Strategi kolaborasi ini saling melengkapi (Wouters et al., 2023) yang memiliki pengaruh penting pada cara individu dan kelompok berpikir dan berperilaku satu sama lain (Nan & Ouyang, 2020). Jumlah peserta dalam rangka peningkatan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif melalui jaringan organisasi administratif di Kabupaten Kolaka memiliki peran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melibatkan peserta yang beragam dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memiliki dampak positif terhadap pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kolaka. Keragaman ini membawa berbagai perspektif, sumber daya, dan pengetahuan yang dapat diterapkan pada strategi pembangunan.

Dalam penelitian ini, keterlibatan pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya, peraturan, dan dukungan keuangan yang diperlukan untuk pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka. Jumlah peserta dari sektor pemerintah mencerminkan tingginya tingkat keterlibatan pemerintah dalam organisasi administrasi jaringan: 1) Kementerian dan Badan Ekonomi Kreatif/Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlibat dalam perencanaan pariwisata strategis dan pengambilan keputusan di tingkat nasional. Ini akan melibatkan beberapa staf dan pejabat tingkat tinggi; 2) Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten terlibat dalam manajemen operasional proyek di tingkat provinsi dan

kabupaten; 3) Layanan Komunikasi dan Informasi yang terlibat dalam komunikasi dan promosi; 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang melibatkan pejabat tingkat kabupaten dan staf administrasi, yang dapat mencapai puluhan orang; 5) Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur listrik, melibatkan beberapa teknisi dan tenaga teknis; dan 6) Badan Usaha Milik Desa dan Pokdarwis yang terdiri dari anggota masyarakat desa. Selain itu, sektor swasta yang terlibat dalam pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif adalah PT Antam Tbk, Perusda, dan PT Vale Indonesia Tbk juga memainkan peran penting dengan menyediakan investasi dan sumber daya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Partisipasi mereka yang signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka.

Kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka. Juga, berpartisipasi dalam peran Masyarakat Sipil dan pemuda lokal yang terdiri dari pemuda yang aktif dalam kegiatan pemuda lokal.

Dapat disimpulkan bahwa kehadiran berbagai peserta dalam upaya pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kolaka memberikan dampak positif. Dengan melibatkan peserta dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, inisiatif ini memperkaya perspektif dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, bekerja sama dengan berbagai aktor, Pemerintah masih memegang kendali penuh dalam pembuatan kebijakan. Analisis (Steyaert et al., 2023) menunjukkan bahwa meskipun aktor non-negara terlibat dalam berbagai jaringan, mereka memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi secara efektif jika dibandingkan dengan pembuat kebijakan lokal.

3. Konsensus tujuan jaringan

Organisasi Administratif Jaringan berupaya memberdayakan pemerintah daerah dengan menyediakan pengetahuan, sumber daya, dan insentif yang mendukung pembuatan kebijakan yang efektif (Nguyen Long & Krause, 2021), Untuk mencapai tujuan bersama dari anggota yang bekerja sama (Iborra et al., 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsensus tujuan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kolaka. Kesepakatan bersama tentang visi, misi, dan tujuan jaringan menjadi landasan penting dalam mengarahkan upaya kolaboratif ini. Dengan konsensus tentang tujuan, semua pihak dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan bersama daripada kepentingan individu atau sektoral. Ini membantu menghindari potensi konflik dan mempromosikan kerja sama yang lebih efektif. Konsensus tujuan juga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks Organisasi Administratif Jaringan. Keputusan yang diambil didasarkan pada visi bersama, yang berarti pengambilan

keputusan menjadi lebih kolaboratif dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Ini juga merangsang inovasi, karena semua pihak merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut dan mencari cara baru untuk mencapainya.

Meskipun indikator "Konsensus Tujuan Jaringan" penting dalam mengukur keberhasilan kolaborasi, indikator ini tidak selalu mencerminkan kualitas sebenarnya dari konsensus tersebut. Dalam konsensus tujuan yang melibatkan sektor swasta dalam pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka ketika sektor swasta merasa dikucilkan dalam proses pengambilan keputusan, ini dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara sektor swasta dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat menghambat kerja sama di masa depan yang juga menghambat pertumbuhan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka.

Riset (Lu & Carter, 2023) Kolaborasi bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dengan menghubungkan upaya untuk meningkatkan legitimasi sistem pangan lokal dalam proses perencanaan, memfasilitasi pencapaian tujuan bersama di tingkat daerah, dan memimpin dengan memberi contoh dalam mendorong kolaborasi yang tidak berbasis hierarkis. Jadi konsensus tujuan jaringan adalah fondasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka. Hal ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama secara efektif menuju visi bersama, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan desa wisata dan ekonomi kreatif.

B. Partisipasi komunitas

Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif melalui Jaringan Organisasi Administratif merupakan faktor penting dalam pengembangan dan keberhasilan inisiatif tersebut. Keterlibatan aktif warga, warga desa, pemuda, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam memberikan masukan, ide, dan aspirasi mereka untuk mengidentifikasi potensi desa dan mencapai tujuan bersama. Peran serta masyarakat juga membantu dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal yang dapat mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti budaya lokal, kearifan lokal, produk lokal, dan warisan alam. Masyarakat dapat terlibat dalam usaha kecil dan menengah, mempromosikan produk lokal, dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, partisipasi masyarakat juga membantu dalam pemeliharaan dan promosi budaya lokal, dengan menjaga identitas budaya dan melestarikannya agar tidak

terpengaruh oleh komersialisasi. Riset (Patadjenu et al., 2023) menjelaskan bahwa tata kelola pariwisata bertujuan untuk menghasilkan solusi dan peluang dengan melibatkan kesepakatan berdasarkan pengakuan saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama. Ini juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui peningkatan akses ke pekerjaan, pendapatan, serta infrastruktur, dan layanan publik. Kemitraan dan kolaborasi yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta adalah kunci dari upaya ini, menciptakan rasa kepemilikan bersama atas inisiatif ini dan meningkatkan koordinasi antara berbagai aktor dalam jaringan administratif. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang tak ternilai dan keterlibatan dalam mewujudkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di daerahnya.

C. Hasil Pengembangan Desa Wisata

Hasil pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif melalui Jaringan Organisasi Administratif di Kabupaten Kolaka dapat mencakup beberapa capaian dan dampak positif:

Hasil Pengembangan Desa Wisata	
Hasil Positif	Informasi
Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Melalui pengembangan desa wisata di Kabupaten Kolaka, terjadi peningkatan daya tarik pariwisata dengan peningkatan fasilitas, promosi yang efektif, dan atraksi yang beragam, menarik lebih banyak pengunjung, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata.
Pertumbuhan Ekonomi Lokal	Pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan bisnis lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
Partisipasi komunitas	Partisipasi aktif masyarakat setempat menciptakan rasa memiliki dan berperan dalam pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kolaka. Hal ini meningkatkan kebanggaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Peningkatan Infrastruktur dan Layanan	Pembangunan desa wisata seringkali menghasilkan perbaikan infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum. Ini memberikan manfaat langsung kepada komunitas lokal dan pengunjung.
Kerjasama Lintas Sektor	Melalui Network Administrative Organizations, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menghasilkan solusi holistik dan efektif dalam pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif. Penyelarasan tujuan bersama meningkatkan efektivitas upaya tersebut.
Peningkatan Pendapatan	Peningkatan pendapatan terjadi melalui lapangan kerja baru dan peluang bisnis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membantu meningkatkan kehidupan masyarakat lokal.
Penggunaan Teknologi	Pemasaran melalui platform media sosial kepada pengunjung dan melalui pelaksanaan festival yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat.

Hasil pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif melalui Jaringan Organisasi Administratif di Kabupaten Kolaka menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Ini juga membantu dalam mempromosikan Kabupaten Kolaka sebagai tujuan wisata yang menarik. Promosi dilakukan melalui media sosial kepada pengunjung dan melalui penyelenggaraan festival yang diadakan oleh pemerintah setempat bekerja sama dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif melalui Jaringan Organisasi Administratif di Kabupaten Kolaka telah menghasilkan beberapa capaian positif. Ada peningkatan daya tarik pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata yang menarik, peningkatan fasilitas pariwisata, promosi yang lebih efektif, dan keragaman atraksi. Selain itu, ada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan bisnis lokal. Aspek pelestarian budaya dan warisan lokal juga mendapat perhatian, dan masyarakat setempat merasa memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif. Infrastruktur dan layanan juga telah mengalami perbaikan, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pengunjung. Kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil melalui Jaringan Organisasi Administrasi telah membantu menghasilkan solusi holistik dan berkelanjutan. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal adalah dampak positif lainnya. Dengan demikian, hasil pembangunan ini menciptakan pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, serta mempromosikan Kabupaten Kolaka sebagai tujuan wisata yang menarik. Keberhasilan ini didukung oleh tingkat kepercayaan yang tinggi, partisipasi masyarakat, konsensus tentang tujuan, dan kompetensi tingkat jaringan dalam jaringan administratif.

REFERENSI

- Adriaenssens, J., Eyssen, M., Jonckheer, P., Vriesacker, K., & Sannaert, M. (2019). The Belgian Evidence-Based Practice Program. *International Journal of Evidence-Based Healthcare*, 17, S68–S71. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000183>
- Afifa Yuniarti, S., Ridwa, H., & Lestari, D. T. (2022). Sinergi Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Badan Usaha Milik Desa dalam Mempromosikan Wisata Sungai Tamborasi.

PAMARENDA : Public Administration and Government Journal, 2(1), 127.

<https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i1.26423>

Al-Omoush, K. S., Garrido, R., & Cañero, J. (2023). The impact of government use of social media and social media contradictions on trust in government and citizens' attitudes in times of crisis. *Journal of Business Research*, 159, 1–11.

<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113748>

Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. (2023). Predicting determinant factors and development strategy for tourist villages. *Decision Science Letters*, 12(1), 137–148.

<https://doi.org/10.5267/j.dsl.2022.9.003>

Boeke, S. (2017). National cyber crisis management: Different European approaches.

Governance, 31(3), 1–16. <https://doi.org/10.1111/gove.12309>

Braun, T. (2018). Configurations for Interorganizational Project Networks: The Interplay of the PMO and Network Administrative Organization. *Project Management Journal*, 49(4), 53–61. <https://doi.org/10.1177/8756972818781710>

Fafurida, F., Purwaningsih, Y., Mulyanto, M., & Suryanto, S. (2023). Tourism Village Development: Measuring the Effectiveness of the Success of Village Development. *Economies*, 11(5), 133. <https://doi.org/10.3390/economies11050133>

Geron, N. A., Martin, D. G., Rogan, J., & Healy, M. (2023). Residents' roles as environmental policy actors using an urban governance framework: A case study of a tree planting program. *Cities*, 135(February), 1–14.

<https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104201>

Handayani, S. M., Jamhari, J., Waluyati, L. R., & Mulyo, J. H. (2019). Kontribusi Pendapatan Agrowisata Padi Sawah Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pada Berbagai Kategori Desa Wisata. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/10.18196/agr.5173>

Iborra, S. S., Saz-Carranza, A., Fernández-i-Marín, X., & Albareda, A. (2018). The Governance of Goal-Directed Networks and Network Tasks: An Empirical Analysis of European Regulatory Networks. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(2), 270–292. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux037>

Khan, S., Umer, R., Umer, S., & Naqvi, S. (2021). Antecedents of trust in using social media for E-government services: An empirical study in Pakistan. *Technology in Society*, 64, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101400>

Khayatzaheh-Mahani, A., Ruckert, A., & Labonté, R. (2017). Obesity prevention: co-framing

- for intersectoral ‘buy-in.’ *Critical Public Health*, 28(1), 4–11.
<https://doi.org/10.1080/09581596.2017.1282604>
- Kozuch, B., & Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2022). Building collaborative trust in public safety networks. *Safety Science*, 152, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105785>
- Lacatus, C. (2022). Regulatory networks and regional human rights governance: A study of the European Network of National Human Rights Institutions. *International Relations*, 36(2), 192–213. <https://doi.org/10.1177/00471178211052880>
- Lu, H., & Carter, A. (2023). Emergent regional collaborative governance in rural local food systems development. *Community Development*, 54(2), 228–256.
<https://doi.org/10.1080/15575330.2022.2135550>
- Manandhar, B., Dongol, Y., & Ganapati, E. (2022). Governing the post-disaster recovery network in Nepal: Organizational challenges of public managers. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 81, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103245>
- Nahrawi, M., Alwi, & Ibrahim, A. (2021). Network Administrative Organization Dalam Implementasi Kebijakan Sektor Publik: Studi Kasus Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2538–2548. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2538-2548>
- Nan, R., & Ouyang, F. (2020). Influence of Social Networks on Citizens’ Willingness to Participate in Social Governance: Evidence from China. *Complexity*, 2020, 1–16.
<https://doi.org/10.1155/2020/3819514>
- Nguyen Long, L. A., & Krause, R. M. (2021). Managing policy-making in the local climate governance landscape: The role of network administrative organizations and member cities. *Public Administration*, 99(1), 23–39. <https://doi.org/10.1111/padm.12684>
- Padhil, A., & Purnomo, H. (2018). Macroergonomic approaches as a solution to local wisdom-based tourist village development planning. *MATEC Web of Conferences*, 154, 01080. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201815401080>
- Patadjenu, S., Sondang Silitonga, M., & Asropi, A. (2023). Tata kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. *Kepariwisataaan Indonesia*, 17(1), 23–48. <https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.23-48>
- Piatak, J., Romzek, B., LeRoux, K., & Johnston, J. (2018). Managing Goal Conflict in Public Service Delivery Networks: Does Accountability Move Up and Down, or Side to Side? *Public Performance & Management Review*, 41(1), 152–176.
<https://doi.org/10.1080/15309576.2017.1400993>

- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Rosari, D., Lubis, S. N., Rujiman, R., & Purwoko, A. (2023). Positive effect on the development regional of the Karo Regency by creative economic basic honey UMKM. *ISEPROLOCAL*, 373, 1–8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337304012>
- Steyaert, A., Dessen, J., & Prové, C. (2023). Exploring approaches to equal and effective participation of governance actors in trans-local city food networks. *Geoforum*, 145(August), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103831>
- Wang, D., & Li, D. (2021). The cognition of the spatial art forms of tourist villages based on ecological engineering and sustainable development. *Sciendo*, 28(4), 581–595. <https://doi.org/10.2478/eces-2021-0038>
- Whetsell, T. A., Leiblein, M. J., & Wagner, C. S. (2020). Between promise and performance: Science and technology policy implementation through network governance. *Science and Public Policy*, 47(1), 78–91. <https://doi.org/10.1093/scipol/scz048>
- Wibowo, A., Karsidi, R., Sudardi, B., & Wijaya, M. (2021). The Development of Organic Tourism Villages Based on Participation and Local Wisdom in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 232, 1–9. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123204004>
- Wouters, S., Janssen, M., Lember, V., & Cromptvoets, J. (2023). Strategies to advance the dream of integrated digital public service delivery in inter-organizational collaboration networks. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101779. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101779>
- Zha, Q., He, X., Zhan, M., & Lang, N. (2023). Managing consensus in balanced networks based on opinion and Trust/Distrust evolutions. *Information Sciences*, 643, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.119223>